

## PENGARUH DANA PERIMBANGAN, BELANJA DAERAH, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH

Sealys Harie Saputri

sealyscharie@gmail.com

Kurnia

### ABSTRACT

*Financial performance of local government is related to their work outcome level, which aims to find out the performance of financial management. Therefore, this research aimed to examine the effect of balance fund, local expenditure, and local owned source revenue on local financial performance of district or cities of east java province. The population was 38 local government of district or cities of east java province 2015-2017. while, the total population was 115 local governments. Moreover, the data collection technique used saturated sample. Futhermore, the research was quantitative. Additionally, the data were secondary which taken from the audit board of the republic of indonesia respresentative of east java. In addition, the data analysist techique used multiple linear regression with SPSS (Statistical Product Service Solution) 25. the research result concluded balance fund had negative effect on local financial performance. Likewise, local experiance had negative effect on local financial performance. On the other hand, local owner-source revenue had positive effect on local financial performrnace*

*Keyword: balance fund, local experiance*

### ABSTRAK

Kinerja Keuangan Daerah merupakan tingkat capaian hasil kerja daerah dibidang keuangan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 38 pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2015-2017 sehingga seluruh total populasi adalah 114 pemerintah daerah. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode sampling jenuh yaitu pemilihan sampel dengan mengambil seluruh data populasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Timur. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah, Belanja Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

Kata kunci: dana perimbangan, belanja daerah

### PENDAHULUAN

Indonesia memasuki era pergeseran orientasi pemeritahan dari *commad and control* menjadi orientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik yang kemudian membentuk suatu otonomi daerah (Mardiasmo, 2002: 8). Dengan berbagai paket kebijakan serupa dimasa lalu, yakni sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya kepada daerah dalam mengelola daerahnya sendiri, hal tersebut tentunya akan memacu daerah dalam mencapai kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Implikasi dari pemberian kewenangan otonomi

menuntut daerah untuk melaksanakan pembangunan diberbagai bidang, terutama untuk pelayanan dan pembangunan sarana dan prasarana publik (Ernawati, 2017: 2). Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam membuat kebijakan dan peraturannya sendiri untuk mengatur keseluruhan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerahnya, baik dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber ekonomi dan sumber pengelolaan kekayaan daerah lainnya. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber utama pendapatan pemerintah daerah dari sektor retribusi dan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Salah satu indikator kemandirian suatu daerah diukur melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya oleh karena itu, PAD memiliki peran yang penting dalam menentukan kinerja keuangan daerah dan kemandirian daerah (Liando, 2017: 5).

Analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah daerah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Hamid, 2018). Analisis kinerja keuangan dipengaruhi oleh berbagai komponen yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran pada APBD yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Menurut Darwanis dan Saputra (2014) Pendapatan Asli Daerah merupakan tolak ukur sebuah daerah mampu mendanai kegiatannya sendiri yang berasal murni dihasilkan dari daerah tersebut. Permasalahan umum yang sering dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia khususnya dalam bidang keuangan daerah berkaitan dengan PAD belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Minimnya pendapatan asli daerah yang dihasilkan untuk membiayai belanja daerah menunjukkan sebuah daerah belum mampu mengelola keuangannya yang berpotensi menimbulkan rendahnya pertumbuhan ekonomi dan kemandirian daerah sehingga akan menimbulkan jurang ketimpangan sosial dan kemiskinan. Berikut disajikan data berdasarkan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah**  
**Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2015-2017**

Tahun	Laporan Realisasi Anggaran		
	PAD	Dana Perimbangan	Belanja Daerah
2015	12.269.912.641	42.264.840.801	78.103.823.991
2016	15.417.179.370	50.339.949.812	92.282.434.186
2017	19.910.511.891	51.737.523.316	70.620.096.560
Total	47.597.603.902	144.324.313.929	241.006.354.737
Persentase	10,99%	33,33%	55,66%

Sumber: Data Badan Pusat Statistika diolah, 2019

Secara keseluruhan PAD setiap Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan selama 3 tahun penelitian yang berarti pendapatan yang dihasilkan oleh daerah menunjukkan konsistensi pendapatan yang meningkat setiap tahunnya. Naiknya PAD diikuti oleh penerimaan Dana Perimbangan yang setiap tahunnya juga relatif naik. Jika ditinjau dari segi kemandirian daerah meskipun PAD mengalami kenaikan namun setengah dari biaya belanja daerah sebesar 55,66% merupakan kontribusi dari dana perimbangan sebesar 33,33%, artinya lebih dari setengah pengeluaran belanja daerah bersumber dari dana perimbangan. Hal itu menandakan bahwa Pemerintah Daerah membutuhkan dana perimbangan dalam membiayai belanja daerah yang penggunaannya harus digunakan secara optimal. Besarnya dana perimbangan menunjukkan bahwa ketersediaan dana dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan lebih baik sesuai dengan tujuan dana perimbangan (Awwaliyah, 2019). Menurut Gemmel *et al* (dalam Adi dan Ekaristi, 2009) menyatakan bahwa menaikkan

anggaran belanja daerah yang besar merupakan upaya untuk mendapatkan jumlah transfer yang besar. Pernyataan tersebut bisa menggambarkan masih kurang optimal pengelolaan keuangan daerah sehingga hal tersebut menimbulkan konsekuensi logis yang harus diterima oleh Pemerintah Daerah yaitu buruknya penilaian kinerja keuangan daerah tersebut. Untuk meminimalisir dana transfer dari pemerintah pusat, pemerintah daerah harus memaksimalkan potensi-potensi dan kemampuan sumber daya daerahnya untuk mendapatkan penerimaan pendapatan yang maksimal juga. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Ketiga jenis sumber dana tersebut, merupakan pendanaan pelaksanaan Desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Pengeluaran pemerintah daerah yang dilaporkan dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah dalam membiayai kegiatan operasional pemerintahan. Menurut Antari dan Sedana (2018) menyatakan bahwa kegiatan belanja daerah turut berperan dalam menghasilkan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari potensi-potensi yang dimiliki daerah. Belanja daerah memiliki hubungan yang sangat erat dengan kualitas pelayanan publik pada suatu daerah. Belanja yang dilakukan pemerintah memiliki fungsi sebagai suatu kebijakan ekonomi yang akan berdampak pada kemandirian daerah dan pertumbuhan perekonomian di suatu daerah, belanja pemerintah dapat menyebabkan terjadinya stabilitas pada perekonomian (Menyah dan Rufael, 2013). Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ayu (2018). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, artinya adanya kenaikan PAD dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Indriani dan Sastradipraja (2014) menyatakan secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian Andirfa *et al* (2016) menyatakan bahwa secara parsial belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, dan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Penelitian Sari (2016) menyatakan bahwa dana perimbangan terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur? (2) Apakah Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur? (3) Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur? Dan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan dapat diketahui tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk menguji pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah. (2) Untuk menguji pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. (3) Untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah.

## TINJAUAN TEORITIS

### Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah pusat dengan daerah. Secara rata-rata dana perimbangan di daerah lain di Indonesia dihitung 80 persen dari penerimaan daerah (Andirfa *et al*, 2016). Apabila

realisasi anggaran pendapatan daerah lebih rendah dibandingkan dengan belanja daerah akan mengakibatkan terjadinya defisit. Oleh sebab itu untuk menutup kekurangan belanja daerah maka pemerintah daerah mendapatkan transfer dana berupa dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat.

### **Belanja Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mendefinisikan belanja daerah merupakan kewajiban daerah berupa pengeluaran yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran untuk memenuhi kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana. Tujuan dipergunakannya belanja daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan bersama.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari penerimaan pajak bersumber dari dalam daerah yang berhubungan guna membiayai kegiatan daerah tersebut yang bersumber pendapatan daerah terdiri pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kewenangan dalam memungut pajak dan retribusi daerah tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Sedangkan menurut UU No 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut oleh daerah yang bersumber dari pajak maupun non pajak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

### **Kinerja Keuangan Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kinerja merupakan keluaran atau hasil dari program atau kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi (Andirfa *et al*, 2016). Sedangkan Kinerja Keuangan Daerah merupakan tingkat capaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya (Wibawa *et al*, 2017).

### **Penelitian Terdahulu**

Pertama, penelitian menurut Mustikarini dan Fitriyani (2012) meneliti tentang "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007". Hasil penelitian belanja daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Sampel penelitian ini dilakukan pada seluruh 275 Pemda Kabupaten/Kota. Penelitian ini menggunakan data *cross section* dengan LPPD dan LKPD yang telah diaudit.

Kedua, Penelitian menurut Kusrina (2014) meneliti tentang "Pengaruh Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (PKPD) Terhadap Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi pada Daerah Otonomi Baru di Indonesia". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini mencakup seluruh Kabupaten/Kota daerah otonomi baru dengan data yang dianalisis adalah data sekunder yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistika. Teknik analisis data menggunakan Struktural Equation Modeling (SEM).

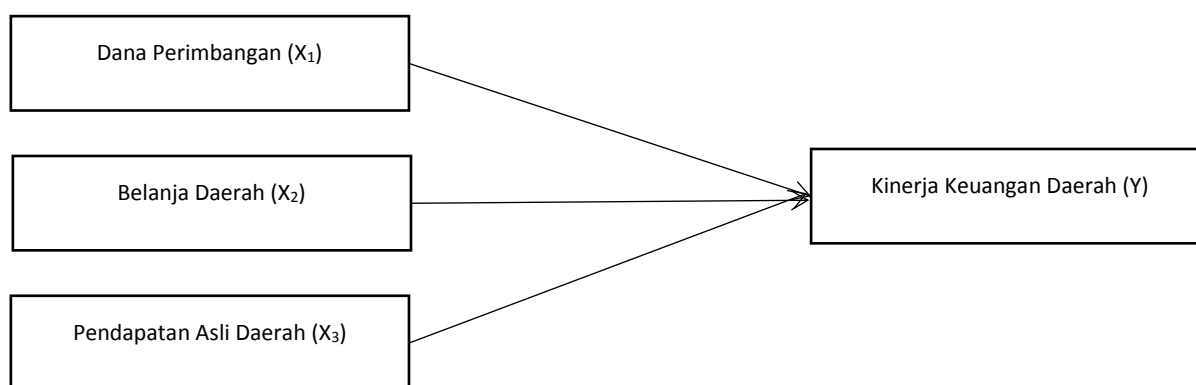
Ketiga, Penelitian menurut Renas dan Muid (2014) meneliti tentang “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan belanja daerah terhadap kinerja keuangan. Sampel yang digunakan di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 105 sampel. Teknik pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling* selama 2009-2011.

Keempat, Penelitian menurut Darwanis dan Saputra (2014) meneliti tentang “Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh)”. Hasil penelitian adanya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan. Sampel yang digunakan di Provinsi Aceh sebanyak 23 daerah Kabupaten/Kota. Teknik penelitian menggunakan sensus periode 2009-2012.

Kelima, Penelitian menurut Indriani dan Sastradipraja (2014) meneliti tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah”. Hasil penelitian Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi APBD kabupaten/kota Cirebon tahun 2008-2012.

Keenam, Penelitian menurut Furqan dan Hilda (2015) meneliti tentang “Pengaruh Opini Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pemoderasi (Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2014)”. Hasil penelitian realisasi belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 32 Pemerintah Provinsi selama tahun 2010-2014. Sumber data adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD yang bersumber dari Badan Pemeriksa Keuangan.

### Rerangka Konseptual



Gambar 1  
Rerangka Konseptual  
Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

### Pengembangan Hipotesis

#### Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik yang berasal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengembangan kegiatan atau program masing-masing daerah. Dana peimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Tujuan pemberian dana perimbangan ini utamanya pemertaaan seluruh daerah yang ada di Indonesia dengan memperhatikan potensi daerah, keadaan geografis, luas daerah, demografis, dan tingkat pendapatan. Kinerja keuangan daerah merupakan hasil *output* yang penggunaannya harus dilakukan pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja untuk mengetahui apakah pelaksanaan yang telah

direncanakan sesuai dengan yang diharapkan. Hamid (2018) menyatakan bahwa analisis kinerja keuangan pada APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari setiap tahunnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Anggaran yang dialokasikan dari APBN untuk daerah tergantung dari seberapa besar daerah tersebut membutuhkan dana serta dilihat dari berbagai prepektif termasuk kondisi demografis setiap daerahnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian Nugroho dan Prasetyo (2018) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah yang berarti semakin tinggi ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat maka semakin baik pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat sehingga akan berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah yang baik. Penelitian tersebut juga didukung oleh Kusrina (2014) dan Muhayanah (2016) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Alasan tidak berpengaruhnya Dana Perimbangan dikarenakan Pemerintah Daerah mampu mengelola secara maksimal dana yang ditransfer dari Pemerintah Pusat untuk membiayai kebutuhan daerah. Namun penelitian tersebut tidak didukung oleh penelitian Andirfa *et al* (2016) menyatakan bahwa secara parsial dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Artinya semakin besar jumlah penerimaan transfer dana perimbangan maka semakin kuat Pemerintah Daerah bergantung kepada Pemerintah Pusat, serta penelitian Budiando dan Alexander (2016) dan Ayu (2018) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah, artinya besaran dari alokasi belanja daerah sebagian besar dikeluarkan oleh dana perimbangan. Berdasarkan teori diatas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

### **Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah**

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun berjalan. Alokasi belanja yang tepat mempunyai peranan cukup penting untuk mencapai stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Selain itu, belanja juga merupakan alat informasi bagi masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan yang sekaligus dapat dijadikan sebagai alat kontrol dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Belanja merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari bagian pendapatan maupun pembiayaan dalam sistem APBD berbasis kinerja. Kualitas APBD adalah bagian dari kinerja pemerintah daerah, karena mencerminkan bagaimana daerah itu membelanjakan uangnya dengan baik dan benar. Belanja daerah memiliki standar pelayanan minimal yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat konsumen dari pelayanan itu sendiri dalam menentukan seberapa besar anggaran yang harus dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian Mustikarini dan Fitriyanti (2012) menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Total belanja yang besar membuat kinerja keuangan daerah semakin tidak baik karena adanya kemungkinan pengeluaran yang lebih banyak bersifat rutin dibandingkan belanja modal dan infrastruktur yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian Renas dan Muid (2014) menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan belanja daerah terhadap kinerja keuangan. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Furqan dan Hilda (2015) menyatakan bahwa realisasi belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah dimana terdapat kecenderungan bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan belanja daerah melebihi target anggaran yang telah ditetapkan, hal ini berpengaruh terhadap penurunan kinerja keuangan daerah. Namun penelitian ini tidak didukung oleh penelitian Armaja *et al* (2015) yang menunjukkan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja

keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, ketika alokasi belanja daerah meningkat maka semakin tinggi juga pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat hal tersebut akan berpengaruh positif skor kinerja pemerintah daerah tersebut dan penelitian Retnowati (2016) menunjukkan belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

H<sub>2</sub>: Belanja Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah**

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari potensi wilayah yang dipungut sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. PAD sebagai tulang punggung dalam pembiayaan daerah yang memiliki kontribusi terhadap APBD dengan pemahaman, semakin tinggi pendapatan daerah yang dihasilkan maka kinerja keuangan Pemerintah Daerah dianggap mampu dalam membangun daerahnya sendiri dan dapat memungkinkan daerah tersebut dalam memenuhi kebutuhan kegiatan daerah tanpa tergantung pada pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang cukup signifikan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (Liando, 2017: 36). Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi faktor pendukung dari kinerja ekonomi makro. Pertumbuhan yang positif mendorong peningkatan investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong peningkatan perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik dan diikuti investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD Pemda tersebut (Mustikarini dan Fitriyani, 2012). Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Darwanis dan Saputra (2014) menyatakan adanya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti tingginya PAD akan sangat mendukung pertumbuhan kinerja keuangan. Penelitian Abdullah dan Febriansyah (2015) dan Budiarto dan Alexander (2016) juga menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Peningkatan PAD akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Antari dan Sedana (2018) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tingginya PAD mampu meminimalkan ketergantungan daerah terhadap bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat. Berdasarkan teori diatas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: H<sub>3</sub>: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari populasi (Objek) Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menganalisis data dalam bentuk angka-angka dengan prosedur statistika. Teknik penelitian ini menggunakan penelitian Kausal Komparatif (*Causal Comparative Research*), yang merupakan penelitian yang menganalisis hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel (Heryanti *et al*, 2019). Populasi adalah keseluruhan dari satuan-satuan individu yang memiliki karakteristik yang sama dan bersifat general (Sekaran dan Bougie, 2017: 53). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Povinsi Jawa Timur, yang berjumlah 38 Kabupaten/Kota.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil untuk diteliti sehingga mampu menarik kesimpulan dapat digeneralisasi terhadap populasi ketertarikan (Sekaran dan Bougie, 2017: 55). Dalam penelitian ini teknik pengambilan dilakukan secara sensus atau sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel dengan mengambil semua data populasi. Dalam penelitian ini jumlah yang diambil adalah populasi terbatas sehingga peneliti

mengambil jumlah sampel sama dengan jumlah populasi yaitu Laporan Realisasi Anggaran APBD dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2015-2017.

### **Teknik pengumpulan data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui perantara secara tidak langsung berupa buku, jurnal, maupun arsip-arsip yang telah dipublikasikan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK.RI) perwakilan Provinsi Jawa Timur berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan pada periode 2015-2017.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan metode dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengadakan penelaahan, pengelompokan, pencatatan, dan perhitungan data-data yang berhubungan dengan penelitian (Liando, 2017: 43). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa Laporan Realisasi Anggaran APBD periode 2015-2017 Provinsi Jawa Timur.

### **Variabel dan definisi operasional variabel**

Variabel penelitian pada penelitian ini menggunakan variabel bebas yang terdiri dari Dana Perimbangan, Belanja Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah dan variabel dependen adalah Kinerja Keuangan Daerah.

### **Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan, transfer dari pemerintah pusat yang dialokasikan dari APBN dengan satuan rupiah sesuai dengan perundang-undangan.

### **Belanja Daerah**

Belanja daerah menurut pengeluaran pemerintah daerah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dipenuhi oleh swasta. Sedangkan pengeluaran pemerintah itu sendiri tidak begitu saja dilaksanakan oleh suatu pemerintah daerah, tapi harus direncanakan terlebih dahulu (Gorahe *et al*, 2014).

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang bersumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai Perundang-Undangan yang berlaku dengan diukur menggunakan satuan rupiah.

### **Kinerja Keuangan Daerah**

Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil/*output* kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan alat ukur keuangan sesuai dengan Perundang-Undangan. Semakin besar pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang lain baik berupa bantuan pemerintah pusat ataupun pinjaman maka daerah dikatakan mandiri.

### **Teknik Analisa Data**

Analisis data dalam penelitian kuantitatif ini menggunakan metode analisis statistik yang perhitungannya menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Teknik



analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah analisis mengenai satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen.

### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah metode dalam pengelolaan data agar data tersebut dapat diinterpretasikan mengenai suatu kegiatan. Analisis deskriptif digunakan untuk banyak data yang diolah dilihat dari nilai minimal dan maksimum data, nilai rata-rata, standar deviasi dan varian.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji model regresi, variabel dependen dan variabel independen atau kedua variabel mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2018: 161). Metode untuk menguji normalitas model regresi tersebut dengan analisis statistika (*one sample Kolmogorov Smirnov*) maupun pendekatan grafik adalah sebagai berikut: (a) Pendekatan Grafik, Salah satu cara termudah melihat normalitas data dengan melihat grafik, yaitu grafik normal *Probability Plot of Regression Standart*, dengan pengujian ini disyaratkan bahwa data normal jika penyebarannya sepanjang 45<sup>o</sup> garis diagonal dan mengikuti garis diagonal antara 0 dari pertemuan sumbu X dan Y maka model regresi memenuhi asumsi normalitas dan sebaliknya. (b) Pendekatan *Kolmogrov-Smirnov*, Pendekatan yang kedua menggunakan pendekatan non-parametrik statistik dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Menurut Ghozali (2018: 30), dasar pengambilan keputusan untuk menentukan pengujian normalitas data yaitu sebagai berikut: (1) Data dikatakan normal jika *Asymp. Sig.* > 0,05. (2) Data dikatakan tidak normal jika *Asymp. Sig.* < 0,05. Tidak terpenuhinya normalitas pada data yang diuji disebabkan oleh data yang tidak normal karena terdapat nilai yang terlalu ekstrem pada data yang diambil untuk diuji.

#### Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk melihat apakah model regresi antar variabel bebas saling berkorelasi. Cara untuk menguji adanya multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Varians Inflation Factor* (VIP). Menurut Ghozali (2018:108) menyatakan cara mendeteksi tidaknya multikolinieritas adalah sebagai berikut: (a) Apabila nilai VIF < 10 atau nilai *tolerance* > 0,10, maka tidak terjadi multikolinieritas, (b) Apabila nilai VIF > 10 atau nilai *tolerance* < 0,10, maka terjadi multikolinieritas.

#### Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018:111) menyatakan bahwa uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (Sebelumnya) jika terjadi korelasi maka dinamakan problem autokorelasi. Cara untuk menentukan ukuran ada tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW) dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Apabila nilai DW dibawah -2 ( $DW < -2$ ) maka terjadi autokorelasi positif. (b) Apabila nilai DW berada diantara -2 dan +2 ( $-2 \leq DW \leq +2$ ) maka tidak terjadi autokorelasi. (c) Apabila nilai DW diatas 2 ( $DW > 2$ ) maka terjadi autokorelasi negatif

#### Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah terjadi ketidaksamaan varian dengan model regresi dari residual satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Menurut (Ghozali, 2018: 142) menyatakan cara mendeteksi adanya heteroskedastisitas dalam model regresi dapat diketahui melalui pola gambar *Scatterplot*, prediksi variabel Independen (ZPRED) dengan variabel residualnya (SRESID). Analisis pada pola gambar *Scatterplot*

dikatakan tidak terdapat heterokedastisitas, jika: (a) Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah sekitar angka 0. (b) Titik-titik penyebarannya tidak boleh membentuk pola pada satu tempat tertentu yang membentuk gelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.

### **Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi bertujuan untuk mengukur dan menguji kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih yang mana dapat menjelaskan ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Selain untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan dependen, analisis ini juga menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi berganda menunjukkan hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Metode ini digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan dana perimbangan, belanja daerah, dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Berikut adalah persamaan model yang digunakan:

$$KKD = a + \beta_1 DP + \beta_2 BD + \beta_3 PAD + e$$

### **Pengujian Hipotesis**

#### **Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit*)**

Uji *goodness of fit* digunakan untuk menguji apakah model yang digunakan dalam penelitian ini layak atau tidak. Uji kelayakan model ini juga dikenal dengan uji F. Uji F pada hakikatnya mengukur efektifitas model atau mengukur berapa persen variasi Y yang bisa dijelaskan oleh seluruh variabel independen yang digunakan, dengan kriteria pengujian tingkat signifikan  $\alpha = 0,05$ . Nilai F hitung digunakan untuk menguji ketepatan model atau *goodness of fit*, apakah model persamaan yang terbentuk masuk dalam kriteria cocok (*fit*) atau tidak. Ghazali (2018: 98) menyatakan cara menguji hipotesis dengan Uji F dengan kriteria adalah sebagai berikut: (a) Jika nilai probabilitas ( $\text{sign} < 0,05$ ) maka,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya semua variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. (b) Jika nilai probabilitas ( $\text{sign} > 0,05$ ) maka,  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya semua variabel independen tidak dapat mempengaruhi variabel dependen.

#### **Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas (Ghozali, 2016: 95). Untuk memprediksi variasi variabel dependen agar dapat memberikan semua informasi nilai harus mendekati satu pada variabel independen. Artinya setiap tambahan satu variabel independen maka  $R^2$  pasti cenderung meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016: 96).

#### **Uji t**

Pengujian hipotesis secara statistika dilakukan setelah bebas dari uji penyimpangan asumsi klasik. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018: 98). Uji t dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel pada tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha = 0,05$ ). Signifikansi 5% artinya penelitian ini menentukan risiko kesalahan dalam menentukan keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis dan sisanya 95% sebagai tingkat kepercayaan dalam mengambil keputusan. Cara mengetahui uji t adalah sebagai berikut: (a)

Jika probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. (b) Jika probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

## HASIL PENELITIAN

### Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif memberikan gambaran data dengan menggunakan suatu metode dengan menganalisis data kuantitatif. Hasil pengumpulan data sekunder mengenai Kinerja Keuangan Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah ditampilkan dalam statistik deskriptif diantaranya jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Hasil statistik deskriptif dari variabel dalam penelitian disajikan dalam Tabel 2 sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DP	114	171561.43	2309229.75	1261985.7025	455938.98588
BD	114	706783.75	7912409.15	2152247.8507	1126972.98159
PAD	114	104233.58	5161844.57	437846.2551	707821.73280
KKD	114	8.60	182.93	24.0500	25.45601
Valid N (listwise)	114				

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa jumlah observasi (N) yang diteliti sebanyak 114 data pengamatan. Data tersebut diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 sampai dengan 2017 yang telah diaudit oleh BPK, dengan hasil deskripsi masing-masing variabel sebagai berikut: (1) Dana Perimbangan (DP), Pada tabel 2 terlihat Dana Perimbangan memiliki nilai minimum sebesar Rp 171.561,43 Juta selama 3 tahun periode penelitian. Dana Perimbangan memiliki nilai maksimum sebesar Rp 2.309.229,75 Juta selama 3 tahun periode penelitian. Dana Perimbangan memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp 1.261.985,7025 Juta dan memiliki standar deviasi sebesar Rp 455.938,98588 Juta. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata (*mean*), sehingga dapat disimpulkan bahwa data dana perimbangan terdistribusi secara normal. (2) 2. Belanja Daerah (BD), Pada Tabel 2 terlihat bahwa variabel Belanja Daerah memiliki nilai minimum sebesar Rp 706.783,75 Juta selama 3 tahun periode penelitian. Belanja Daerah memiliki nilai maksimum sebesar Rp 7.912.409,15 Juta selama 3 tahun periode penelitian. Belanja Daerah memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp 2.152.247.8507 Juta dan memiliki standar deviasi sebesar Rp 1.126.972,99 Juta. Nilai standar deviasi yang lebih lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata (*mean*), maka dapat dikatakan bahwa data belanja daerah terdistribusi secara normal. (3) Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pada Tabel 2 terlihat Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai minimum sebesar sebesar Rp 104.233,58 Juta selama 3 tahun periode penelitian. Pendapatan asli daerah memiliki nilai maksimum Rp 5.161.844,57 Juta selama 3 tahun periode penelitian. Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp 437.846,25 Juta dan memiliki standar deviasi sebesar Rp 707.821,73 Juta. Nilai standar deviasi yang lebih lebih besar dibandingkan nilai rata-rata (*mean*), sehingga dapat disimpulkan bahwa data Dana Perimbangan terdistribusi cenderung tidak normal. (4) Variabel Kinerja Keuangan Daerah (KKD), Pada Tabel 2 terlihat bahwa Kinerja Keuangan Daerah memiliki nilai minimum sebesar 8,60 selama 3 tahun periode penelitian. Kinerja keuangan daerah memiliki nilai maksimum sebesar 182,93 selama 3 periode penelitian. Kinerja Keuangan Daerah memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 24,0500 dan memiliki standar deviasi sebesar 25,45601. Nilai standar deviasi yang lebih lebih besar

dibandingkan nilai rata-rata (*mean*), menunjukkan bahwa data terdistribusi cenderung tidak normal.

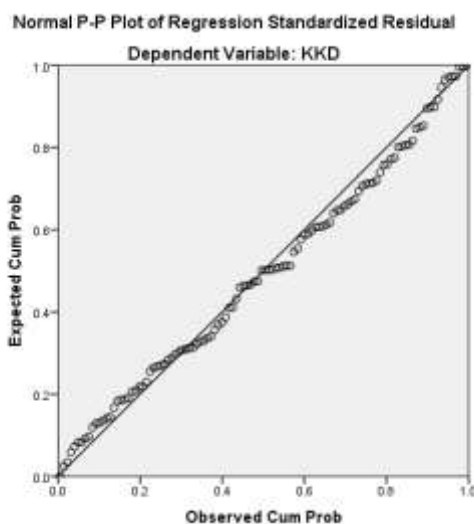
### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji model regresi, variabel dependen dan variabel independen atau kedua variabel mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2018: 161). Hasil uji normalitas dengan menggunakan pendekatan grafik dan *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat dibawah ini:

#### Pendekatan grafik

Menilai apakah data terdistribusi dengan normal menggunakan pendekatan grafik, yaitu grafik *Normal Probability Plot* dengan metode pengujian ini data dinyatakan normal jika penyebaran data disepanjang garis  $45^{\circ}$  garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas maka diperoleh analisis grafik sebagai berikut:



Gambar 2  
Grafik Pengujian Normalitas Data  
Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa data menyebar disepanjang garis  $45^{\circ}$  garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan data dinyatakan normal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

#### Pendekatan *Kolmogorov-Smirnov*

Hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3  
Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		114
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,000000
	Std. Deviation	,09099702
Most Extreme Differences	Absolute	,067
	Positive	,058

Negative	-,067
Test Statistic	,067
Asymp. Sig. (2-tailed)	,200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan program SPSS versi 25 diperoleh hasil yang ditunjukkan pada Tabel 3. Pengujian dengan *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan signifikansi lebih besar 0,05 yaitu 0,200 menunjukkan data terdistribusi normal, sehingga model regresi layak untuk digunakan.

### Uji Multikolinieritas

Pengujian ini bertujuan untuk mendeteksi apakah ada atau tidak suatu problem multikolinieritas, menganalisis ada tidaknya problem tersebut dapat dilihat pada nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIP). Tabel 4 berikut menunjukkan hasil dari uji multikolinieritas:

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
DP	,234	4,282
BD	,108	9,288
PAD	,255	3,917

a. Dependent Variable: KKD

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa dari semua variabel hasil perhitungan nilai *tolerance* > 0,10 dan hasil perhitungan VIF < 10, hal ini berarti dalam persamaan regresi tidak terjadi multikolinieritas atau tidak terjadi korelasi antara variabel independen dan telah memenuhi asumsi uji multikolinieritas.

### Uji Autokorelasi

Menurut Ghazali (2018:111) menyatakan bahwa uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t. Untuk mengetahui adanya problem autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW) dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Autokorelasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,986 <sup>a</sup>	,973	,972	,09223	1,714

a. Predictors: (Constant), PAD, DP, BD

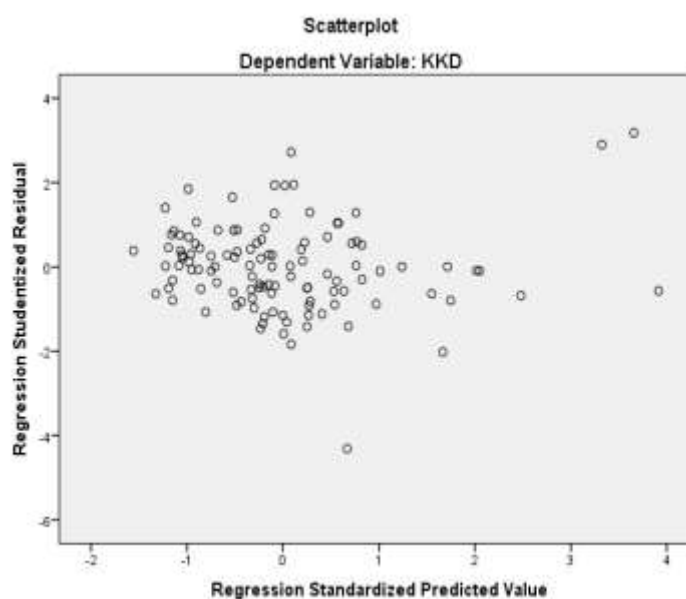
b. Dependent Variable: KKD

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa angka *Durbin Watson* sebesar 1,714. Nilai tersebut berada diantara -2 dan +2 ( $-2 \leq 1,714 \leq +2$ ) maka disimpulkan dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah terjadi ketidaksamaan varian dengan model regresi dari residual satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. (Ghozali, 2018: 142) menyatakan terdapat cara mendeteksi adanya heteroskedastisitas dalam model regresi dapat diketahui melalui pola gambar *Scatterplot*, prediksi variabel Independen (ZPRED) dengan variabel residualnya (SRESID). Hasil uji output SPSS heteroskedastisitas menggunakan grafik *scatterplot* dapat dilihat pada Gambar 3 sebagai berikut:



Gambar 3  
Regression Standardized Predicted Value  
Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Hasil pengujian statistik Gambar 3 menunjukkan hasil heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik Scatterplot terlihat titik-titik telah menyebar, tidak membentuk pola tertentu, dan menyebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada penelitian ini.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Data dari variabel-variabel yang telah diukur, dilakukan pengujian dan analisis regresi untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan, belanja daerah, dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6  
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,964	,292		13,596	,000
DP	-,248	,041	-,195	-5,988	,000
BD	-,836	,055	-,722	-15,083	,000
PAD	1,156	,024	1,499	48,229	,000

a. Dependent Variable: KKD

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Hasil regresi pada Tabel 6 diatas dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut:  
 $KKD = 3,964 - 0,248DP - 0,836BD + 1,156PAD + e$

Persamaan regresi linier berganda tersebut memiliki arti pada masing-masing variabel adalah sebagai berikut: (1) Persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 3,964 artinya jika variabel independen yaitu dana perimbangan, belanja daerah, dan pendapatan asli daerah dianggap sama dengan nol maka nilai kinerja keuangan daerah yang dihasilkan sebesar nilai konstanta. (2) Nilai koefisien dana perimbangan sebesar -0,248. Nilai koefisien regresi negatif hal ini menunjukkan adanya perubahan yang berlawanan arah. (3) Nilai koefisien belanja daerah sebesar -0,836. Nilai koefisien regresi negatif hal ini menunjukkan adanya perubahan yang berlawanan arah. (4) Nilai koefisien pendapatan asli daerah sebesar 1,156. Nilai koefisien regresi positif hal ini menunjukkan adanya perubahan yang searah.

### Pengujian Hipotesis

#### Uji Kelayakan Model/Goodness of Fit (Uji F)

Uji F ini dapat dijelaskan dengan menggunakan *analysis of variance* (ANOVA) dengan kriteria pengujian tingkat signifikan  $\alpha = 0,05$ . Apabila probabilitas (sig)  $< \alpha = 0,05$  maka model penelitian yang digunakan layak sebaliknya probabilitas (sig)  $> \alpha = 0,05$  maka model penelitian yang digunakan tidak layak. Hasil uji kelayakan model regresi disajikan pada Tabel 7 sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit)**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	33,502	3	11,167	1314,333	,000 <sup>b</sup>
	Residual	,819	110	,007		
	Total	34,321	113			

a. Dependent Variable: KKD

b. Predictors: (Constant), PAD, DP, BD

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Berdasarkan hasil output SPSS pada Tabel 7 menunjukkan hasil uji kelayakan model/*goodness of fit* menunjukkan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 1314,333 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan model yang digunakan pada penelitian ini layak. Artinya Dana Perimbangan, Belanja Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

#### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016: 95). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel dependen. Untuk mengetahui nilai koefisien determinasi dengan melihat nilai R Square. Berikut ini hasil pengukuran koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 8 sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,986 <sup>a</sup>	,973	,972	,09223

a. Predictors: (Constant), PAD, DP, BD

b. Dependent Variable: KKD

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Nilai *R Square* hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 8 diketahui sebesar 0,973 atau 97,3% dapat diartikan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja daerah mampu mempengaruhi kinerja keuangan daerah sebesar 0,973 atau 97,3% sedangkan sisanya ( $100\% - 97,3\% = 2,7\%$ ) sisa 2,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

### Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dapat menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018: 98). Menentukan uji t dengan membandingkan t hitung dengan t tabel pada tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha = 0,05$ ). (a) Jika probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. (b) Jika probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

**Tabel 9**  
**Hasil Uji t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,964	,292		13,596	,000
DP	-,248	,041	-,195	-5,988	,000
BD	-,836	,055	-,722	-15,083	,000
PAD	1,156	,024	1,499	48,229	,000

a. Dependent Variable: KKD

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 9 maka dapat disimpulkan masing-masing variabel adalah sebagai berikut: (1) Dana Perimbangan memiliki  $t_{hitung}$  sebesar -5,988 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , Artinya Dana Perimbangan dinyatakan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah, demikian hipotesis pertama yaitu Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah ditolak. (2) Belanja Daerah memiliki  $t_{hitung}$  sebesar -15,083 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , Artinya Belanja Daerah dinyatakan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah, dengan demikian hipotesis kedua yaitu Belanja Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah diterima. (3) Pendapatan Asli Daerah memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 48,229 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , Artinya Pendapatan Asli Daerah dinyatakan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah, dengan demikian hipotesis ketiga yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah diterima.

### Pembahasan

#### Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah guna mendukung pelaksanaan desentralisasi terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 285 ayat (2) disebutkan dana perimbangan terbagi menjadi 3 alokasi, antara lain Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Jumlah Dana Perimbangan yang sebagaimana dimaksud ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Hasil penelitian uji hipotesis menunjukkan Dana Perimbangan memiliki  $t_{hitung}$  sebesar -5,988 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara parsial Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah, dengan demikian hipotesis pertama ditolak. Hal ini dikarenakan oleh semakin tinggi transfer dana dalam bentuk Dana Perimbangan kepada daerah maka akan semakin kuat pemerintah daerah



bergantung kepada pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Secara statistika dana perimbangan yang diberikan kepada hampir seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur memperoleh kenaikan dana sebesar 15% namun hal tersebut tidak diimbangi dengan naiknya kinerja keuangan daerah tersebut. Pengaruh Dana perimbangan yang negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah menunjukkan setiap perubahan kenaikan pada variabel Dana Perimbangan maka relatif akan mempengaruhi penurunan pada Kinerja Keuangan pemerintah daerah dan sebaliknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu, yaitu oleh Ariwibowo (2015) dengan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah berdasarkan rasio kemandirian daerah. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh beberapa penelitian Budianto dan Alexander (2016), Andirfa *et al* (2016), dan Ayu (2018) menyatakan bahwa secara parsial dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah yang berarti apabila dana perimbangan meningkat maka dapat menurunkan kinerja keuangan daerah namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kusrina (2014) dan Muhayanah (2016) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, berarti kenaikan dan penurunan kinerja keuangan daerah tidak mempengaruhi secara keseluruhan kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah**

Belanja daerah pada dasarnya merupakan fungsi dari penerimaan daerah dimana besarnya akan sangat bergantung pada sumber-sumber pembiayaan daerah, baik yang berasal dari penerimaan sendiri maupun dari transfer pemerintah pusat. Menurut pengeluaran daerah belanja daerah berperan mempertemukan permintaan masyarakat dengan sarana dan prasarana yang tidak terpenuhi oleh pihak swasta. Hasil penelitian uji hipotesis menunjukkan Belanja Daerah memiliki  $t_{hitung}$  sebesar -15,083 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara parsial Belanja Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah, dengan demikian hipotesis kedua diterima. Berpengaruhnya belanja daerah yang negatif disebabkan oleh penggunaan belanja bersifat rutin (langsung) yang lebih besar dibandingkan belanja modal dan infrastruktur (tidak langsung) yang mana belanja modal memiliki nilai manfaat untuk jangka panjang bagi masyarakat yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tersedianya infrastruktur yang mumpuni dari penggunaan belanja yang bersifat rutin/operasi inilah yang membuat kinerja keuangan daerah menurun namun disisi lain belanja modal juga dapat berpengaruh negatif ketika pengeluaran belanja modal melebihi anggaran yang ditetapkan namun tidak menghasilkan sumber keuangan secara langsung bagi daerah yang tentunya berdampak pada kinerja keuangan daerah yang menurun. Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian sebelumnya Mustikarini dan Fitriasari (2012) membuktikan bahwa variabel belanja daerah berpengaruh negatif terhadap skor kinerja Pemda Kabupaten/Kota pada tingkat keyakinan 99%. Penelitian Renas dan Muid (2014) juga menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah namun penelitian ini tidak didukung oleh penelitian Armaja *et al* (2015) dan Retnowati (2016) yang menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Artinya belanja daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah dalam bentuk berbagai fasilitas dan pelayanan yang layak untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah**

Pendapatan Daerah bersumber dari penerimaan dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah, lain-lain pendapatan yang sah, dan pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli

Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari wilayahnya sendiri yang dipungut dari penerimaan pajak maupun penerimaan non pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian uji hipotesis menunjukkan Pendapatan Asli Daerah memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 48,229 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah, dengan demikian hipotesis ketiga diterima. Hasil ini memberikan arti bahwa tingginya kemampuan daerah dalam menghasilkan dan mengelola pendapatan asli daerah, maka akan tinggi pula tindakan dan keputusan dalam hal menggunakan pendapatan asli daerah tersebut yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan pembangunan daerah. Peningkatan PAD yang tinggi dihasilkan oleh pajak daerah yang dinilai paling strategis untuk bisa meningkatkan target PAD seperti pajak PBB dan Bea Perolehan BPHTP. Hasil inilah yang membuktikan bahwa semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah maka dapat mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan daerah tersebut. Hasil penelitian ini mendukung konsistensi hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indriani dan Sastradipraja (2014), Darwanis dan Saputra (2014), Abdullah dan Febriansyah (2015), serta penelitian Budiarto dan Alexander (2016) menyatakan bahwa secara parsial PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah untuk Rasio Kemandirian. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian Antari dan Sedana (2018) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tingginya pendapatan asli daerah yang mampu dihasilkan daerah dapat meminimalkan ketergantungan daerah terhadap bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh dana perimbangan, belanja daerah, dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Sampel penelitian ini adalah 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur periode 2015 - 2017. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah, artinya semakin tinggi nilai transfer dana dari pemerintah pusat kepada daerah semakin rendah kinerja keuangan pemerintah daerah dan sebaliknya. (2) Belanja Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah, artinya semakin meningkatnya alokasi belanja daerah, maka semakin menurunnya kinerja keuangan daerah. Meningkatnya biaya yang dialokasikan belanja daerah tidak diimbangi dengan kinerja keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dan infrastruktur yang memadai untuk kesejahteraan masyarakat. (3) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah, artinya semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan dan mengelola pendapatan asli daerah, semakin tinggi pula kinerja keuangan daerah. Tingginya pendapatan asli daerah yang dihasilkan berarti PAD mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut: (1) Pada umumnya semua Kabupaten dan Kota di Jawa Timur masih belum dikatakan mandiri dari segi finansial, rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah sangat rendah yaitu sebesar 24,04% sesuai dengan tabel kriteria rasio kemandirian daerah. Hal ini berarti pemerintah daerah dalam membiayai segala aktifitas daerahnya masih bergantung pada dana transfer. (2) Penerimaan daerah yang berasal dari

PAD belum maksimal oleh sebab itu pemerintah daerah diharapkan agar lebih mengembangkan dan menggali potensi dari sektor-sektor khususnya dalam bidang ekonomi daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah terkhusus pendapatan asli daerah agar lebih mandiri secara finansial dalam mendanai seluruh aktivitas pemerintahan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (3) Pemerintah daerah untuk memenuhi kemampuan belanja daerah diharapkan lebih diprioritaskan kepada pengadaan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang akan meningkatkan produktivitas publik. (4) Menambahkan variabel kontrol lainnya dalam model penelitian misalnya belanja operasi, ukuran pemerintah daerah, kebijakan pemerintah, dan status daerah serta menjadikan salah satu variabel independen menjadi variabel moderasi ataupun mediasi. (5) Untuk peneliti selanjutnya diharapkan memperbanyak sampel penelitian tidak hanya 3 periode tahun anggaran saja namun bisa lebih untuk hasil penelitian yang lebih baik agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Febriansyah. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII Medan*. 1(9):1-23.
- Adi, P.H. dan P.D. Ekaristi. 2009. Fenomena Ilusi Fiskal. Adi, P.H. dan P.D. Ekaristi. 2009. Fenomena Ilusi Fiskal dalam Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 6(1): 1-19.
- Andirfa, M., H. Basri, dan M.S.A. Majid. 2016. Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi* 5(3):30-38.
- Antari, N.P.G.S. dan I.B.P. Sedana. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud* 7(2): 1080-1110.
- Armaja, R. Ibrahim, dan Aliamin. 2015. Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 3(2): 168-181.
- Ariwibowo, T. 2015. Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* 11(3): 335-344.
- Awwaliyah, N. F. 2019. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang. 3(3) 90-130
- Ayu, P. P. 2018. Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Se-Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi FE. UN PGRI Kediri* 3(1): 80-96.
- Budianto dan S.W. Alexander. 2016. Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Magister Akuntansi* 5(3): 30-38.
- Darwanis dan R. Saputra. 2014. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* 1(2): 183-199.
- Ernawati. 2017. Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya. 1(1): 1-24
- Furqan, A.C dan R. Hilda. 2015. Pengaruh Opini Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Realisasi Pendapatan & Belanja Daerah sebagai Pemediasi (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2010-2014). *Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung*. 24-27 Agustus 2016: 1-32.

- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivarite dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi Sembilan. Cetakan Sembilan. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gorahe, I.A.M., V. Masinambow, dan D. Engka. 2014. Analisis Belanja Daerah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan* 14(3): 1-12.
- Hamid, A. A. 2018. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka Jawa Barat. *Jurnal Sekuritas* 1(4): 38-51.
- Heryanti, C. D., Wahidahwati, dan B. Suryono. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan* 3(1): 98-116.
- Indriani, D. Dan U. Sastradipraja. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Cirebon. *Portofolio* 11(1): 55-76.
- Kusrina, B. L. 2014. Pengaruh Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (PKPD) Terhadap Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi pada Daerah Otonomi Baru di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 3(2): 868-880.
- Liando, I. I. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, *Flypaper Effect* dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Andi. Yogyakarta.
- Menyah, Kojo, dan Y. W. Rufael. 2013. Government Expenditure and Economic Growth: The Ethiopian Experience, 1950-2007. *The Journal of Developing Areas* 47(1): 263-280.
- Muhayanah, F. A. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah 2012-2013. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 1(4): 1-60
- Mustikarini, W.A. dan D. Fitriasari. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*. 20-23 September 2012: 1-23.
- Nugroho, T. R. dan N. E. Prasetyo. 2018. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan* 7(1): 27-34.
- Renas dan D. Muid. 2014. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting* 4(3): 1-15.
- Retnowati, R. 2016. Analisis Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Sari, I. P. 2016. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kab/Kota Pulau Sumatra. *JOM Fekon* 3(1): 679-692.
- Sekaran, U dan R. Bougie. 2017. *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Edisi Keenam. Buku Kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintah Daerah*. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.

Wibawa, D.T., Hasbudin., Ruslin., dan T. Dharmawati. 2017. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Opini Wajar dengan Pengecualian di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Simposium Nasional Akuntansi XX Jember*. 27-30 September: 1-36.